

PERTEMUAN 11 EKONOMI PENDIDIKAN

Nama : Syifa Hesti Pratiwi

NPM : 2313031003

SOAL KASUS

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

1. Analisis Struktur Pengeluaran

- **Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?**
Menurut saya, struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya masih belum efisien. Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar dana yaitu 68% masih digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Sementara itu, alokasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran seperti pelatihan guru, digitalisasi sekolah, dan bantuan siswa masih relatif kecil. Kondisi ini terlihat dari rendahnya skor literasi dan numerasi serta masih tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di kota dan desa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum menghasilkan output pendidikan yang optimal.
- **Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?**
Anggaran perlu direalokasi terutama pada peningkatan kualitas guru, bantuan siswa, dan pengembangan infrastruktur digital. Sebagian anggaran administrasi dan belanja yang kurang berdampak langsung terhadap pembelajaran dapat dialihkan ke program tersebut. Hal ini penting karena masalah utama yang dihadapi bukan hanya fasilitas fisik, tetapi juga kualitas pembelajaran, pemerataan guru, dan akses teknologi. Dengan alokasi yang lebih seimbang, anggaran pendidikan akan lebih berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa..

2. Analisis Sumber Pembiayaan

- **Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?**
Ya, pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih cukup bergantung pada pemerintah daerah. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah apabila kemampuan fiskal daerah menurun atau terjadi perubahan prioritas anggaran. Selain itu, kebutuhan pendidikan yang terus meningkat akan sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan APBD
- **Perlu kah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat**
Perlu. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, terutama dalam penyediaan teknologi dan sarana pembelajaran. Model yang dapat diterapkan adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penyediaan perangkat digital, laboratorium, dan beasiswa. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi. Dengan cara ini, kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

- **Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?**

Praktik OECD yang paling realistis diterapkan adalah performance-based budgeting, peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan, dan sistem evaluasi berbasis data. Anggaran dapat diberikan berdasarkan kebutuhan dan capaian pendidikan, bukan hanya berdasarkan jumlah sekolah atau siswa. Selain itu, evaluasi berbasis data dapat membantu pemerintah melihat sekolah mana yang membutuhkan bantuan lebih besar sehingga kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

- **Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?**

Tantangan utamanya adalah kualitas data pendidikan yang belum merata, keterbatasan kapasitas pengelolaan data di daerah, serta kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Selain itu, masih terdapat kesenjangan fasilitas dan teknologi antarwilayah sehingga penerapan sistem seperti negara OECD memerlukan penyesuaian dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, implementasinya harus dilakukan secara bertahap.

4. Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- **Perubahan struktur belanja**

Dalam lima tahun ke depan, anggaran pendidikan perlu lebih difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan. Porsi anggaran untuk kualitas guru, digitalisasi sekolah, dan bantuan siswa perlu ditingkatkan, sementara belanja yang kurang produktif dapat dikurangi. Dengan demikian, anggaran tidak hanya habis untuk biaya rutin, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

- **Strategi peningkatan kualitas guru**

Pemerintah perlu melakukan pemerataan distribusi guru dengan memindahkan kelebihan guru di perkotaan ke daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, pelatihan rutin terkait literasi, numerasi, teknologi digital, dan metode pembelajaran inovatif perlu diperkuat. Insentif khusus bagi guru yang mengajar di daerah terpencil juga perlu ditingkatkan agar distribusi guru menjadi lebih merata.

- **Digitalisasi sekolah**

Program digitalisasi dapat dilakukan melalui penyediaan internet di seluruh sekolah, pembangunan laboratorium komputer, dan penyediaan perangkat pembelajaran digital. Prioritas utama diberikan kepada sekolah di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.

- **Mekanisme monitoring dan evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan data pendidikan, seperti hasil literasi dan numerasi, distribusi guru, tingkat kehadiran siswa, dan penggunaan teknologi pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan anggaran pada tahun berikutnya sehingga

program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.